

WAJIB BELAJAR 9 TAHUN:

Sejarah Kebijakan Dalam Bidang Pendidikan (1994-2001)

Oleh: **Abrar**

Dosen Sejarah FIS UNJ

Abstrak

The purpose of this article is to describe 9-year compulsory education policy applied by the government of Indonesia in 1994-2001. There are three aspect will described in this article; the background of compulsory education, compulsory education policy, and its implementation. The policy were related to political issue and the concept of compulsory education. Compulsory education program aimed at children age 7-15 years. The implementation of compulsory education involved the central government to the district level. Besides the government, the policy were also involved society in education. Quantitatively, the gross participation rate of compulsory education was achieved, but the result is not achieved as qualitative. There are many lack the implementation of both the quality of teachers and quality of facilities and infrastructures.

Kata kunci:

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Compulsory Education, dan Universal Primary Education, Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana.

Pendahuluan

Program wajib belajar 9 tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 dan direncanakan tuntas pada tahun 2008. Suksesnya wajib belajar 9 tahun tersebut ditandai dengan tercapainya target angka partisipasi pada tahun 2008 sebesar 95 persen. Program wajib belajar 9 tahun merupakan suatu hal yang amat penting bagi kehidupan bangsa. Sebab program itu terkait erat dengan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan.

Pendidikan itu diperlukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan. Pembangunan dalam bidang pendidikan melalui program

wajib belajar itu diharapkan dapat mengurangi jumlah manusia Indonesia yang buta huruf. Melek huruf menjadi kunci bagaimana maju mundurnya seseorang atau kelompok orang dalam kehidupan. Melek huruf memungkinkan manusia untuk mampu mengatasi tantangan kehidupan yang dari waktu ke waktu semakin kompleks dan berat.

Paparan berikut menguraikan bagaimana kebijakan wajib belajar yang dicanangkan pemerintah berlangsung dari tahun 1994-2001. Paparan yang disajikan dalam tulisan diawali dari kebijakan yang didalamnya terdapat latar belakang kebijakan dan bentuk kebijakannya. Selanjutnya dipaparkan implementasi

kebijakan yang dilihat dari aspek tenaga pendidik (guru), peserta didik (siswa), kurikulum, sarana dan prasarana.

Kebijakan Wajib Belajar

Program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres No. 1 tahun 1994 tanggal 15 April bukanlah program yang dikeluarkan secara mendadak. Program itu nampaknya merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun yang telah sukses dilakukan. Suksesnya wajib belajar 6 tahun yang dilaksanakan pemerintah telah mendorong UNESCO untuk memberikan penghargaan Aviciena pada tahun 1984.¹

Mengacu kepada Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya ketentuan tentang wajib belajar telah ada dalam pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Hanya saja pada ayat 3 terdapat klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sampai keluarnya Inpres mengenai wajib belajar 9 tahun, PP yang dimaksud ayat 3 tersebut tidak kunjung ada. Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan PP tersebut? Berdasarkan sumber-sumber

yang didapatkan, tidak ada keterangan resmi pemerintah kenapa selama kurang lebih 5 tahun tidak mengeluarkan PP sebagaimana yang diamanatkan UU No. 2 tahun 1989.

Dirjen Dikdasmen Depdikbud Zainal Arifin Achmady dalam Seminar Pendidikan Dasar di FKIP Universitas Slamet Riyadi Solo mengungkapkan wajib belajar di Indonesia tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, melainkan berupa Inpres sebab wajib belajar di Indonesia tidak identik dengan dengan wajib belajar (*compulsary education*) sebagaimana di negara-negara maju.² Di negara-negara maju *compulsary education* bercirikan; adanya unsur paksaan, diatur dengan undang-undang wajib belajar, sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Sedangkan wajib belajar di Indonesia lebih diartikan sebagai *universal primary education* yaitu terbukanya kesempatan luas bagi peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Sasaran utamanya untuk menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Program wajib belajar 9 tahun diharapkan selesai pada tahun 2004. Hal itu dilakukan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi pasar global, baik pasar bebas AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003 maupun APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) tahun 2010.³ Dengan demikian program ini merupakan upaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mengejar

¹ H.A.R Tilaar. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000 hal 15.
Marlan Harahap. "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun" dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, Jakarta, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2003 hal 45.

² *Kompas*, 2 April 1994.

³ Marlan Harahap, *loc. cit.*

dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman yaitu mengimbangi tuntutan persaingan antar bangsa.

Alasan lain yang mendasari dilaksanakannya wajib belajar 9 tahun adalah dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, khususnya sektor industri. Sebagaimana diketahui sektor industri merupakan sektor kedua terbesar menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Oleh karena itu kualifikasi tenaga kerja yang hanya setingkat Sekolah Dasar tidak cukup memadai untuk menunjang perkembangan industri. Padahal waktu itu lebih dari 80 persen tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar.⁴ Presiden Soeharto mengatakan dengan program wajib belajar 9 tahun tersebut pendidikan yang dilakukan diharapkan memberi pengetahuan dan keterampilan dasar serta kemampuan untuk mencari nafkah bagi peserta didik. Selain itu Presiden juga menyatakan bahwa pendidikan yang dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang utuh.⁵ Lebih dari itu Presiden Soeharto dalam sambutannya membuka Konferensi Ke-29 Dewan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) di Istana Negara Jakarta mengatakan bahwa wajib belajar 9 tahun dapat diperpanjang menjadi 12 tahun karena ia merupakan pelaksanaan dari amanat pendahulu bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut mantan Direktur Pendidikan Dasar Djauzak Ahmad wajib belajar 9 tahun merupakan program yang dipaksakan mengingat wajib belajar 6 tahun belum siap karena 20 persen anak-anak belum memperoleh pendidikan dasar pada waktu itu. Wajib belajar 9 tahun lebih dilandasi kepentingan politik yaitu untuk menunjukkan Indonesia sebagai suatu negara yang amat memperhatikan pendidikan.⁶ Hal itu nampaknya berkaitan dengan adanya komitmen yang disampaikan pemerintahan Indonesia dalam pertemuan *World Education Forum* pada bulan Maret 1990 untuk bersama-sama dengan negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar angka yang tidak sekolah atau putus sekolah untuk menuntaskan wajib belajar dalam jangka waktu sepuluh tahun.⁷ Negara-negara yang menjadi penyumbang terbesar tersebut adalah Indonesia, Banglades, Brazil, Cina, India, Mexico, Mesir, Nigeria dan Pakistan.

Mengingat Indonesia mulai melaksanakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 maka dengan sendirinya pemerintah harus menyelesaikan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1994. Karena program wajib belajar 6 tahun telah dianggap sukses maka pemerintahan Indonesia melanjutkan program

⁴ *Kompas*, 1 Februari 1994.

⁵ *Kompas*, 4 Februari 1994.

⁶ *Kompas*, 8 Maret 2000.

⁷ Mohamad Surya. *Bunga Rampai Guru dan Pendidikan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hal 112.

tersebut dengan program wajib belajar 9 tahun.

Pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang menjadi lampiran dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1994 mengungkapkan bahwa pengelolaan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 16 Oktober 1995 mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Berdasarkan Kepmen tersebut wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Sangat jelas disini bahwa warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar sampai tamat terutama bagi yang berusia antara 7 sampai dengan 15 tahun.

Dari sisi fungsional pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sebagai berikut; (1) Pada tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah, Pemuda, dan Olahraga, (2)

Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (3) Pada tingkat kabupaten/kotamadya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya atau Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, dan (4) Pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atau Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.⁸

Pada tataran satuan pendidikan pelaksanaan wajib belajar di Sekolah Dasar (SD) diselenggarakan oleh Direktur Pendidikan Dasar. Sementara untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) oleh Direktur Pendidikan Menengah Umum dan pendidikan luar sekolah oleh Direktur Pendidikan Masyarakat. Dengan demikian sebagai sebuah gerakan wajib belajar 9 tahun melibatkan semua unsur pejabat mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan. Pada akhirnya semua pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar itu dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia secara periodik.⁹

Selain tentang usia wajib belajar, di dalam keputusan menteri itu juga diungkapkan bahwa secara

⁸ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar tanggal 16 Oktober 1995.

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar tanggal 15 April 1994.

teknis setiap satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan demikian setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. Hal itu sejalan dengan bahagian penjelasan instruksi presiden yang menyebutkan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat.¹⁰

Berkaitan dengan masalah pendanaan, kebijakan yang dikeluarkan adalah bila pelaksanaan wajib belajar pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah maka pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara bila diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.¹¹ Meskipun begitu dalam keputusan menteri tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap akan mendapat bantuan dana sepanjang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal pendanaan itu diungkapkan juga bahwa kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan. Sedangkan bagi yang bersekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat peserta didik menanggung sebahagian dari biaya pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut tidak

menyinggung masalah sumber dana yang bisa didapatkan oleh pengelola satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Padahal pasal 27 dari PP itu menyebutkan pengelola satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat, terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber dana dalam rangka perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Yang jelas pemerintah sampai akhir Repelita VII menyiapkan dana sebesar 19,8 trilyun. Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas baru, guru, SPP, buku dan peralatan, serta pemeliharaan.¹²

Kebijakan yang dikembangkan pemerintah mengenai kurikulum sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar dan bahasa Inggris. Selain itu dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa satuan pendidikan dapat menambah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kepmendikbud, *loc. cit.*

¹² *Kompas*, 24 Mei 1996.

mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan.

Apa yang terdapat di dalam PP kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hasan, pada tahun 1993 ditetapkan menjadi kurikulum pendidikan dasar.¹³

Keputusan Menteri Pendidikan itu menjelaskan bahwa pendidikan dasar yang diselenggarakan di SD bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar baca-tulis-hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Sementara pendidikan dasar yang diselenggarakan di SLTP bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah.

Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah menetapkan mata pelajaran yang merupakan isi kurikulum pendidikan dasar sebagai berikut: (1), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Pendidikan Agama, (3) Bahasa Indonesia, (4) Matematika, (5) Ilmu Pengetahuan Alam, (6) Ilmu Pengetahuan Sosial, (7) Kerajinan Tangan dan Kesenian, (8)

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, (9) Bahasa Inggris, dan (10) Muatan Lokal.¹⁴

Perbedaan yang terdapat dari isi kurikulum pendidikan dasar antara SD dengan SLTP adalah kedalaman dan keluasan isi bahan pelajaran masing-masing mata pelajaran. Selain itu berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar tidak wajib diajarkan. Ia menjadi mata pelajaran muatan lokal yang dapat diajarkan bilamana diperlukan bagi masyarakat di daerah dan didukung oleh tersedianya tenaga pengajar. Untuk sekolah dasar itu mata pelajaran bahasa Inggris baru dapat diajarkan mulai kelas IV.

Berkaitan dengan muatan lokal dijelaskan bahwa fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu maka muatan lokal ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II. Selain bahasa Inggris yang menjadi muatan lokal itu antara lain; bahasa daerah, kesenian daerah, kerajinan daerah, pengetahuan mengenai berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar.¹⁵

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar

Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu; 1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, 2) tidak memiliki sanksi

¹³Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993 tentang "Kurikulum Pendidikan Dasar" tanggal 25 Februari 1993

¹⁴ Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 dalam "Kurikulum Pendidikan Dasar Landasan, Program dan Pengembangan", Jakarta, Depdikbud, 1993, hal 6.

¹⁵ Ibid., hal 12.

hukum, tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, 3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, 4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi sekolah anak usia 6-15 tahun.

Meskipun tolok ukur keberhasilan program wajib belajar itu diukur dari tingkat partisipasi sekolah anak, tetapi ada beberapa aspek yang dapat dilihat bagaimana perkembangan pelaksanaannya selama tahun 1994-2001 tersebut.

Tenaga Guru

Ketika program wajib belajar 9 tahun mulai dilaksanakan tahun ajaran 1994/1995 guru Sekolah Dasar (SD) jumlahnya 1.172.640 orang.¹⁶ Dari jumlah itu dilihat dari tingkat pendidikan ada sebanyak 1.011.602 orang yang berpendidikan SLTA, 20.847 orang tamatan PGSLP/D1. Sementara yang tamatan sarjana muda/D3 ada sebanyak 29.481 orang dan tamatan sarjana 32.263 orang. Sisanya tamatan SLTP ke bawah.¹⁷ Padahal tahun ajaran 1993/1994 guru yang tamatan SLTA ada sebanyak 1.017.820 orang, tamatan PGSLP/D1 ada sebanyak 18.300 orang. Ini artinya terjadi pengurangan jumlah guru yang berpendidikan SLTA, sementara pada sisi yang lain terjadi peningkatan jumlah guru yang berpendidikan SLTA ke atas.

¹⁶ Angka-angka mengenai jumlah guru sekolah dasar didapatkan dari *Statistik Indonesia tahun 1996-2002* dan *Indonesia Education Statistic Brief tahun 1995/1996-1998/1999*.

¹⁷ Angka-angka mengenai tingkat pendidikan guru didapatkan dari *Statistik Persekolahan SD 1993/1994-1994/1995, 1997/1998-2001/2002* dan *Indonesia Education Statistics In Brief 1995/1996-1996/1997*.

Pada tahun ajaran 1997/1998 penurunan jumlah guru yang berpendidikan SLTA ke bawah berjalan terus. Guru yang berpendidikan SLTA ada sebanyak 864.025 orang. Ada penurunan sejumlah 109.663 orang. Guru yang berpendidikan SLTP juga turun jumlahnya. Jika pada tahun ajaran 1995/1996 jumlahnya 76.058 orang maka pada tahun ajaran 1997/1998 berjumlah 64.931 orang. Untuk yang berpendidikan SLTA ke atas ada sebanyak 74.061 orang guru pendidikannya PGSLP, 102.559 orang berpendidikan sarjana muda/D3 dan sarjana sebanyak 51.939 orang. Peningkatan cukup besar terjadi terhadap guru-guru yang berpendidikan sarjana muda yang jumlahnya mencapai 49.756 orang dalam jangka waktu dua tahun.

Ketika krisis baru berjalan dua tahun di Indonesia jumlah guru SD seluruhnya 1.141.168 orang. Guru SD yang berpendidikan magister/S2 pada tahun ajaran 1999/2000 mencapai 290 orang. Padahal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan sumber yang didapatkan tidak diungkapkan secara spesifik berapa guru yang berpendidikan magister/S2. Yang jelas sumber-sumber tersebut hanya menyebutkan sarjana dan magister. Patut diduga bahwa sesungguhnya guru-guru SD sejak awal pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sudah ada yang berpendidikan magister, namun karena jumlahnya sedikit maka cukup diungkapkan dalam kelompok sarjana. Jumlah tersebut meningkat terus sampai tahun 2001/2002 yang mencapai 579 orang.

Demikian juga yang berpendidikan PGSLA/D2 jumlahnya mencapai 364.026 orang pada tahun ajaran 1999/2000. Tahun-tahun sebelumnya tidak terungkap berapa jumlah guru yang berpendidikan PGSLA/D2. Pada tahun 2001/2002 guru SD yang berpendidikan PGSLA/D2 telah mencapai 458.139 orang.

Perubahan yang sangat mencolok juga terjadi pada guru yang berpendidikan SLTP. Jika pada tahun ajaran 1994/1995 jumlahnya mencapai 77.750 orang. Kemudian tahun ajaran 1997/1998 jumlahnya mencapai 64.931 orang, maka pada tahun ajaran 1999/2000 jumlahnya tinggal 7.989 orang.

Guru-guru yang mengajar di tingkat SLTP berdasarkan sumber yang didapatkan selama periode 1994-2001 jumlah guru SLTP cenderung meningkat dari tahun ke tahun tingkat pendidikannya. Pada tahun ajaran 1994/1995 terdapat 392.588 orang guru SLTP.¹⁸ Jumlah itu meningkat pada tahun ajaran berikutnya yang mencapai 412.065 orang guru. Dari jumlah tersebut yang berpendidikan sarjana muda/D3 ke bawah berjumlah 283.956 orang dan sarjana dan pascasarjana jumlahnya 85.506 orang. Sisanya sebanyak 42.630 orang masih berpendidikan SLTA.¹⁹

Pada kelompok sarjana muda/D3 ke bawah itu maka yang

terbanyak berada pada tingkat PGSLP/D1 yang jumlahnya mencapai 126.863 orang. Sementara kelompok sarjana ke atas yang terbanyak adalah sarjana yang mencapai 85.233 orang. Tingkat pendidikan guru yang pasca sarjana hanya 273 orang. Baik pada kelompok sarjana muda ke bawah maupun pada kelompok sarjana ke atas ada guru-guru yang dari segi pendidikan bukan tamatan keguruan yang jumlahnya 28.905 orang.

Pada tahun ajaran 1998/1999 jumlah guru SLTP seluruhnya adalah 452.444 orang. Pada tahun itu guru SLTP yang berpendidikan PGSLP/D1 jumlahnya 61.830 orang, berpendidikan PGSLA/D2 134.867 orang, berpendidikan sarjana muda/D3 sebanyak 104.864 orang, berpendidikan sarjana 149.945 orang. Sementara yang tamatan pasca sarjana sebanyak 938 orang.

Guru-guru SLTP tersebut dari segi pendidikan mengalami kemajuan jika memperhatikan jumlah guru yang berpendidikan PGSLP/D1 dan PGSLA/D2 yang cenderung turun dan jumlah guru berpendidikan sarjana muda/D3 ke atas yang semakin meningkat. Itu terlihat pula pada tahun ajaran 2000/2001 yang tamatan PGSLP/D1 ada 50.780 orang dan PGSLA/D2 ada 97.771 orang. Guru yang tamatan sarjana muda/D3 ada sebanyak 109.805 orang serta yang berpendidikan sarjana sebanyak 184.428 orang. Untuk pasca sarjana terjadi penurunan dengan jumlah hanya 359 orang. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 1999/2000 yang jumlahnya 1.382 orang. Berarti tamatan pasca sarjana jauh menurun jumlahnya.

¹⁸ Angka-angka mengenai jumlah guru SLTP didapatkan dari *Statistik Indonesia tahun 1996-2002* dan *Indonesia Education Statistic Brief tahun 1995/1996-1998/1999*.

¹⁹ Angka-angka mengenai tingkat pendidikan guru SLTP didapatkan dari *Statistik Persekolahan SLTP 1993/1994, 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 dan 2000/2001*.

Siswa

Perkembangan jumlah siswa yang bersekolah baik untuk tingkat sekolah dasar maupun untuk tingkat SLTP selama periode 1994-2001 memperlihatkan kecenderungan menurun. Walaupun begitu pada tahun-tahun tertentu ada juga yang naik.²⁰ Untuk siswa sekolah dasar pada tahun ajaran 1994/1995 jumlah siswa seluruhnya dari kelas satu sampai dengan kelas enam adalah 26.200.023 orang. Yang lulus menyelesaikan pendidikannya di kelas enam pada waktu itu jumlahnya 3.575.250 orang, sementara yang putus sekolah berjumlah 817.164 orang.²¹ Tahun ajaran berikutnya jumlah siswa sekolah dasar seluruhnya turun menjadi 25.948.023 orang. Meskipun angka yang bersekolah jumlahnya turun, namun jumlah yang lulus pada tahun ajaran 1995/1996 naik sedikit menjadi 3.575.264 orang. Sedangkan siswa yang putus sekolah sejumlah 803.108 orang. Kelihatannya jumlah yang putus sekolah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dua tahun berikutnya ketika krisis ekonomi baru melanda Indonesia jumlah siswa sekolah dasar seluruhnya 25.689.693 orang. Jumlah yang lulus ada sebanyak 3.601.516 orang. Terjadi penurunan sebanyak 4.158 orang. Tetapi yang putus sekolah

terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun tersebut yang putus sekolah 752.152 orang, sementara tahun sebelumnya yang putus sekolah hanya 745.659 orang.

Sewaktu krisis ekonomi sudah berjalan dua tahun, pada tahun ajaran 1999/2000, jumlah siswa sekolah dasar juga semakin menurun. Jika tahun ajaran 1998/1999 jumlahnya 25.687.893 orang, maka tahun ajaran berikutnya jumlahnya 25.614.836 orang. Ada penurunan sebanyak 73.057 orang. Demikian juga jumlah yang lulus, terjadi pula penurunan. Jumlahnya turun sebanyak 15.999 orang. Yang putus sekolah mengalami penurunan sebanyak 106.801 orang. Nampaknya faktor krisis ekonomi berpengaruh terhadap jumlah siswa yang putus sekolah. Dalam tahun ajaran 2001/2002 jumlah siswa seluruhnya naik dari 25.701.558 orang pada tahun sebelumnya menjadi 25.850.849 orang. Meskipun jumlah siswa mengalami peningkatan, namun jumlah yang lulus tetap saja mengalami penurunan. Yang lulus pada tahun itu ada sebanyak 3.608.801 orang. Padahal tahun sebelumnya yang lulus ada sebanyak 3.612.842 orang. Untuk angka putus sekolah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 84.779 orang.

Berbeda dengan siswa sekolah dasar, siswa SLTP berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan pada tahun ajaran 1994/1995 siswa SLTP jumlahnya 6.392.417 orang. Tahun berikutnya naik jumlahnya menjadi 6.945.433 orang. Ketika krisis ekonomi baru mulai, tahun ajaran

²⁰ Angka-angka mengenai jumlah siswa baik sekolah dasar maupun siswa SLTP didapatkan dari *Statistik Indonesia tahun 1996-2002* dan *Indonesia Education Statistic Brief tahun 1995/1996-1998/1999*.

²¹ Angka-angka mengenai lulusan dan yang putus sekolah untuk siswa sekolah dasar didapatkan dari *Statistik Persekolahan SD 1994/1995, 1997/1998-2001/2002, 2006/2007* dan *Indonesia Education Statistics Brief 1995/1996-1998/1999*.

1997/1998 jumlah siswa SLTP 7.956.506 orang. Sewaktu krisis ekonomi berjalan terus maka jumlah siswa juga menunjukkan angka penurunan. Pada tahun ajaran 1999/2000 jumlah siswa SLTP sebanyak 7.600.093 orang, sementara dua tahun berikutnya angkanya menunjukkan 7.466.458 orang.

Dilihat dari sisi jumlah siswa yang lulus dan putus sekolah, pada tahun ajaran 1994/1995 siswa SLTP yang lulus jumlahnya 1.740.106 orang.²² Sedangkan yang putus sekolah ada sebanyak 255.728 orang. Tahun ajaran berikutnya jumlah siswa SLTP yang lulus 1.981.201 orang dan yang putus sekolah berjumlah 226.007 orang. Berarti ada peningkatan jumlah siswa yang lulus sebanyak 241.095 orang. Sementara jumlah yang putus sekolah mengalami penurunan sebanyak 29.721 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dua tahun berikutnya tahun ajaran 1997/1998 jumlah siswa SLTP sebanyak 2.315.116 orang. Sedangkan yang putus sekolah jumlahnya 276.438 orang. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya jumlah siswa yang lulus mengalami peningkatan sebanyak 195.692 orang, sementara jumlah yang putus sekolah mengalami penurunan sebanyak 112.908 orang. Angka tersebut memperlihatkan cukup tingginya kesadaran masyarakat, khususnya anak didik betapa pentingnya pendidikan bagi mereka. Namun hal itu tidak dapat

dipertahankan ketika krisis ekonomi berjalan terus di Indonesia.

Pada tahun ajaran 1999/2000 jumlah siswa yang lulus 2.286.782 orang, padahal tahun ajaran sebelumnya jumlah yang lulus 2.246.999 orang. Demikian juga pada tahun ajaran 2001/2002 jumlah siswa yang lulus juga mengalami penurunan. Ada penurunan sebanyak 66.847 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam pada itu untuk angka putus sekolah pada tahun ajaran 1999/2000 mengalami peningkatan sebanyak 20.735 orang jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya yang jumlahnya 313.282 orang. Barulah pada tahun ajaran 2001/2002 angka yang putus sekolah mengalami penurunan. Jumlah yang putus sekolah ada sebanyak 264.591 orang. Bisa jadi kondisi itu disebabkan sudah menunjukkan adanya stabilitas ekonomi dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Bila dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah dan membandingkannya dengan jumlah keseluruhan anak yang bersekolah pada sekolah dasar dan SLTP maka pada tahun 1994 jumlah anak usia sekolah antara 7 s.d 15 tahun adalah 37.045.437 orang.²³ Sedangkan jumlah siswa keseluruhan untuk sekolah dasar dan SLTP ada sebanyak 32.592.440 orang. Itu berarti ada anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebanyak 4.452.997 orang. Tahun berikutnya jumlah anak usia sekolah 36.733.313 orang, sementara jumlah

²² Angka-angka mengenai lulusan dan yang putus sekolah siswa SLTP didapatkan dari *Statistik Persekolahan SLTP 2000/2001* dan *Statistik Persekolahan SMP 2006/2007*.

²³ Angka-angka mengenai jumlah anak usia sekolah didapatkan dari *Statistik Indonesia 1995, 1998, dan 2002*. Untuk tahun 2000 tidak termasuk Aceh dan Maluku dan untuk tahun 2001 yang tidak masuk adalah Aceh.

siswa sekolah dasar dan SLTP 32.893.456 orang. Ada 3.839.857 orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya angkanya menunjukkan cenderung tinggi. Hanya pada tahun 2000 dan 2001 yang jumlahnya relatif sedikit yaitu 534.781 orang dan 971.898 orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Berdasarkan sumber yang didapatkan tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi dengan anak-anak tidak mengenyam bangku pendidikan tersebut.. Pertama, mereka benar-benar anak yang tidak memperoleh pendidikan secara formal. Kedua, mereka kemungkinan memperoleh pendidikan melalui jalur non formal. Sebab bagian penjelasan sumber hanya disebutkan SLTP, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan SLTP tersebut, apakah termasuk juga sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Departemen Agama atau bukan.

Berkaitan dengan APK (angka partisipasi kasar) dan APM (angka partisipasi murni) pada tahun ajaran 2000/2001, APK sekolah dasar termasuk yang bersekolah di MI (Madrasah Ibtidaiyah) secara nasional rata-rata adalah 112,87 %.²⁴ Sedangkan APM sekolah dasar secara nasional rata-rata sebesar 94,75 %. Padahal jika dilihat dari jumlah siswa sekolah dasar dan dibandingkan dengan jumlah usia sekolah maka APM untuk sekolah dasar mencapai 100 % belum

termasuk yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah.

Begitu juga yang terjadi pada APK SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah secara nasional rata-rata adalah 73 %. Sedangkan APM SLTP secara nasional adalah 56,56 %. Padahal jika dilihat dari jumlah siswa SLTP dan dibandingkan dengan jumlah usia sekolah maka APM untuk SLTP mencapai 75,44 % belum termasuk yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah. Artinya angka-angka statistik yang ada bisa jadi bukan angka ril, tetapi angka yang bersifat rekayasa. Kalau demikian maka apa yang disinyalir mantan Direktur Pendidikan Dasar dapat dikatakan sebagai suatu kenyataan.

Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan untuk pendidikan dasar mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990. Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1994 berlaku kurikulum baru bagi siswa SD dan SLTP. Kurikulum Pendidikan Dasar yang berlaku sejak tahun 1994 tersebut dalam pelaksanaannya berlangsung secara bertahap. Pada tahun ajaran 1994/1995 berlaku untuk kelas I dan IV sekolah dasar serta kelas I SLTP, tahun ajaran 1995/1996 berlaku untuk kelas I, II, IV dan V sekolah dasar serta kelas I dan II SLTP. Sementara tahun ajaran 1996/1997 telah mulai berlaku seluruhnya untuk kelas I s.d VI sekolah dasar dan kelas I s.d III SLTP. Paling lambat dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh pada akhir Repelita VI.²⁵

²⁴ Marlan Harahap. "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun" dalam *Selintas Pendidikan Indonesia Di Awal Tahun 2003: Tujuh Isu Pendidikan*, Jakarta, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2003, hal 48-50.

²⁵ *Op.cit*, hal 19

Kurikulum pendidikan dasar tahun 1994 itu didalamnya terkandung susunan mata pelajaran yang jam pelajarannya disesuaikan dengan berdasarkan kelas dan tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar jam pelajaran pada kelas I dan II jumlahnya 30 jam pelajaran, kelas III jumlahnya 38 jam pelajaran, kelas IV sebanyak 40 jam pelajaran. Sementara untuk kelas V, VI dan tingkat SLTP jumlah jam pelajarannya masing-masing 42 jam. Jumlah jam tersebut merupakan jumlah jam pelajaran minimum dalam satu minggu yang dilaksanakan secara klasikal. Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi mata pelajaran pendidikan dasar tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah.

Selain program pembelajaran yang bersifat kurikuler, setiap sekolah diberikan kesempatan untuk melaksanakan program ekstra kurikuler yang diselenggarakan diluar jam pelajaran. Kegiatan ekstra kurikuler tersebut merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler. Selain itu juga ada yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian seperti; kepramukaan, usaha kesehatan sekolah, palang merah, kesenian dan olah raga.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal 15

Tabel 1 Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar (SD dan SLTP)

Sarana dan Prasarana

Dalam upaya untuk tercapainya pelaksanaan program wajib belajar faktor sarana dan prasarana menjadi sesuatu yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Pada tahun ajaran 1994/1995 untuk sekolah dasar jumlah kelas ada sebanyak 1.004.948 kelas yang menampung jumlah siswa sebanyak 26.200.023 orang.²⁷ Jumlah kelas tersebut menggunakan ruangan yang kondisinya memadai untuk terjadinya pembelajaran adalah 730.482 ruangan. Padahal jumlah ruangan kelas ada sebanyak 857.871. Ruangan tersebut merupakan ruangan yang memang milik sendiri baik swasta maupun negeri. Tahun berikutnya jumlah kelas naik menjadi 1.018.470 dengan menampung jumlah siswa sebanyak 25.948.023 orang dan

²⁷ Angka-angka mengenai jumlah kelas dan ruang kelas untuk sekolah dasar didapatkan dari *Statistik Persekolahan SD 1993/1994-1995/1996, 1997/1998-2001-2002 dan Indonesia Education Statistics Brief 1995/1996-1997/1998.*

jumlah ruangan yang kondisinya baik sebanyak 721.937. Sedangkan jumlah ruangan yang milik sendiri sebanyak 860.939. Meskipun terlihat adanya peningkatan jumlah ruangan, tetapi kenyatannya yang dapat dipakai untuk pembelajaran malah semakin menurun.

Jumlah kelas dan ruangan kelas dari tahun ajaran 1995/1996 s.d 2001/2002 memperlihatkan kecenderungan yang relatif stabil, tidak ada fluktuasi yang mencolok dengan jumlah siswa yang ditampung rata-rata sebanyak 25.749.705 orang. Tetapi jumlah ruangan yang kondisinya baik untuk pembelajaran kecenderungan memperlihatkan penurunan. Rata-rata ruangan yang baik untuk pembelajaran ada sebanyak 690.373 kelas. Berarti terjadi kekurangan ruangan untuk pembelajaran. Kekurangan ruangan kelas yang baik buat pembelajaran itu diatasi dengan meminjam atau menyewa ruangan ke pihak kedua, baik dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Hal itu tergambar dari data statistik yang dikeluarkan Departemen Pendidikan yang menyebutkan ruangan kelas milik sendiri dan bukan milik sendiri.

Untuk tahun 2001/2002 terjadi penurunan jumlah kelas dan ruangan yang baik untuk pembelajaran. Padahal jumlah ruang kelas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang jelas dengan semakin turunnya dari waktu ke waktu jumlah ruangan kelas yang relatif baik untuk pembelajaran menunjukkan kurangnya perhatian pemerintahan daerah maupun pusat dalam membenahi dan memperbaiki fasilitas

belajar pada tingkat sekolah dasar, terutama berkaitan dengan tanggungjawab pembangunan seluruh gedung sekolah dasar yang berada ditangan Depdagri.²⁸

Berbeda halnya dengan kelas dan ruangan kelas tingkat SLTP. Pada tahun ajaran 1994/1995 sewaktu program wajib belajar baru dimulai jumlah kelas ada 162.035 untuk menampung jumlah siswa yang besarnya 6.392.417 orang.²⁹ Sementara ruangan kelas yang layak pakai untuk pembelajaran jumlahnya 132.065 ruangan. Tahun ajaran berikutnya dengan jumlah siswa yang ditampung 6.945.433 orang, jumlah kelasnya 171.219 kelas dan yang baik untuk pembelajaran ada 138.464 ruangan kelas. Ada peningkatan jumlah ruangan kelas yang baik untuk pembelajaran. Memang untuk tingkat SLTP terjadi peningkatan terus dalam jumlah ruangan kelas yang baik untuk pembelajaran. Tahun ajaran 2000/2001 sudah mencapai 171.590 ruangan kelas. Namun jika diperhatikan dengan jumlah siswa yang ditampung yang besarnya 7.584.707 orang. Tetap saja masalah ruangan kelas menjadi problem, terjadi kekurangan. Sama dengan sekolah dasar, SLTP juga meminjam atau menyewa ruangan kelas ke pihak kedua.

Kekurangan ruangan kelas baik pada tingkat sekolah dasar maupun SLTP, selain diatasi dengan cara meminjam atau menyewa ke pihak kedua juga dilakukan dengan cara

²⁸ *Kompas*, 7 Januari 1994

²⁹ Angka-angka mengenai jumlah kelas dan ruang kelas untuk SLTP didapatkan dari *Statistik Persekolahan SLTP 1993/1994-2000/2001*.

membangun sekolah-sekolah baru atau ruangan kelas baru. Hal itu nampak sekali untuk tingkat SLTP. Pada tahun ajaran 1994/1995 misalnya pemerintah mencanangkan membangun 145 gedung SLTP negeri dan membangun ruangan kelas beberapa sekolah negeri yang jumlahnya mencapai 10.400 ruangan kelas.³⁰

Selain kelas dan ruangan kelas, untuk tingkat SLTP proses pembelajaran yang baik dipengaruhi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana lainnya misalnya saja laboratorium, perpustakaan dan ruang komputer. Pada tahun ajaran 1994/1995 laboratorium IPA ada sebanyak 8.965 ruang, laboratorium Biologi sebanyak 1.000 ruang, laboratorium Kimia sebanyak 182 ruang, laboratorium Fisika sebanyak 703 ruang, laboratorium Bahasa sebanyak 295 ruang.³¹ Untuk laboratorium IPS belum ada satupun sekolah yang punya dari jumlah sekolah yang mencapai 19.442 sekolah. Perpustakaan yang ada baru 12.837 ruang dan ruang komputer ada sebanyak 923 ruang.

Tahun ajaran 1995/1996 fasilitas tersebut di atas mengalami peningkatan, kecuali ruang perpustakaan. Ruang laboratorium IPA ada sebanyak 8.990 ruang, laboratorium Biologi ada sebanyak 1.017 ruang, laboratorium Kimia ada sebanyak 207 ruang, laboratorium Fisika ada sebanyak 806 ruang, laboratorium Bahasa ada sebanyak 313

ruang. Ruang perpustakaan mengalami penurunan dengan jumlah hanya 12.702 ruang. Yang cukup tinggi peningkatannya adalah ruang komputer yang jumlahnya mencapai 1.209 ruang. Laboratorium IPS sampai tahun itu belum juga kunjung ada. Tidak didapat penjelasan mengenai itu. Namun bisa jadi perhatian sekolah lebih tertuju bagaimana membenahi laboratorium bidang ilmu eksak dan bahasa yang dari segi pengadaan relatif tidak begitu sulit dibandingkan laboratorium IPS. Sarana dan prasarana sekolah itu jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada tetap saja belum cukup. Jumlah sekolah pada waktu itu ada sebanyak 19.968 sekolah.

Peningkatan fasilitas untuk pembelajaran di sekolah tetap dilakukan dari waktu ke waktu. Yang jelas sampai tahun ajaran 2000/2001 jumlah ruang laboratorium IPA 10.687, laboratorium Biologi 1.440, laboratorium Kimia 259, laboratorium Fisika 1.086, laboratorium Bahasa 377, laboratorium IPS 419. Dari sumber yang didapatkan laboratorium IPS baru ada pada tahun ajaran 1997/1998 yang jumlahnya 263 ruang. Sementara untuk ruang perpustakaan mencapai 15.214 ruang dan ruang komputer 2.676 ruang.

Kondisi yang diungkapkan di atas baru memperlihatkan bagaimana jumlah ruang yang tersedia, belum memperlihatkan bagaimana sesungguhnya isi dari masing-masing ruang. Terlepas dari itu tetap saja kondisi tersebut tidak sepadan dengan jumlah sekolah yang ada yang mencapai 20.721 sekolah. Belum lagi jika memperhatikan jumlah SDM yang

³⁰ Kompas, *loc. cit.*

³¹ Angka-angka mengenai fasilitas sekolah tingkat SLTP lihat didapatkan dari *Statistik Persekolahan SLTP 1993/1994-1995/1996, 1997/1998-2000/2001*.

tersedia untuk mengelola laboratorium, perpustakaan dan komputer yang terdapat di masing-masing ruang dan sekolah yang memilikinya.

Kesimpulan

Terlambatnya pemerintah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun disebabkan oleh adanya kepentingan politik. Pada tahun 1989 ketika Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Indonesia sedang melaksanakan program wajib belajar 6 tahun. Program itu baru berlangsung 5 tahun dari yang direncanakan 10 tahun. Sehingga berdasarkan program wajib belajar 6 tahun tersebut maka program itu baru tuntas pada tahun 1994. Ketuntasan pelaksanaan wajib belajar 6 tahun itulah yang ditunjukkan kepada negara-negara *World Education Forum*.

Selain itu faktor lainnya adalah perbedaan konsep wajib belajar yang dilaksanakan Indonesia. Indonesia tidak menggunakan konsep wajib belajar dalam pengertian *compulsary education* sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Konsep wajib belajar yang digunakan Indonesia adalah *universal primary education*. Dalam konsep tersebut lebih ditujukan bagaimana menumbuhkan kesadaran di kalangan orang tua tentang pentingnya wajib belajar bagi anak-anak.

Program wajib belajar 9 tahun tersebut merupakan suatu gerakan nasional pendidikan dasar yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang pesertanya anak-anak berusia 7 s.d 15 tahun. Dalam gerakan itu pelaksanaannya melibatkan satuan

pendidikan mulai dari SD s.d SLTP. Sebagai sebuah gerakan ia juga melibatkan semua komponen baik yang ada dalam pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat s.d pemerintahan tingkat kecamatan maupun masyarakat. Program itu menjadi program yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mencapai itu pemerintah tidak saja mempersiapkan perangkat lunak yang berupa sumber daya manusia, tetapi juga perangkat keras yang berupa seluruh sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam tataran pelaksanaan jika melihat dari persentase APK dan APM sebagaimana yang telah dicapai pada tahun ajaran 2000/2001, program tersebut telah menunjukkan keberhasilan. Namun bila dilihat dari sisi kualitatif keberhasilan program tersebut nampaknya diragukan. Sebab berdasarkan ketersediaan perangkat lunak maupun keras sesungguhnya secara kualitas relatif tidak memenuhi persyaratan. Guru-guru sebagai SDM yang menjadi ujung tombak program itu masih banyak pendidikannya belum sesuai dengan kapasitasnya sebagai guru, apalagi ada guru yang latar belakangnya bukan dari keguruan. Begitu juga dari sisi sarana dan prasarana yang jumlahnya tidak memadai di setiap sekolah yang ada. Terutama sekali keterbatasan ruang laboratorium dan perpustakaan yang dapat mempengaruhi bagaimana hasil yang didapatkan dari sisi kualitas.

Daftar Pustaka:

A. Dokumen

Instruksi Presiden Republik Indonesia
No. 1 Tahun 1994 tentang
*Pelaksanaan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar.*

Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 060/U/1993
tentang *Kurikulum Pendidikan
Dasar.*

Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik
Indonesia No. 0306/U/1995
tentang *Pelaksanaan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar.*

Undang-undang Republik Indonesia
No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

B. Buku

Biro Pusat Statistik. *Indonesia
Education Statistics Brief
1995/1996-1998/1999*, BPS,
Jakarta.

____. *Statistik Indonesia 1996-2002*,
BPS, Jakarta.

Darmaningtyas. *Pendidikan yang
Memiskinkan*, Galang Press,
Yogyakarta, 2004.
*Kurikulum Pendidikan Dasar
Landasan, Program dan
Pengembangan*, Depdikbud,
Jakarta, 1993.

Hadi, Syamsul, dkk. *Post Washington
Consensus dan Politik Privatisasi
di Indonesia*, Marjin Kiri,
Tangerang, 2007.

Makagiansar, Makaminan, dkk. *Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Memorandum Pandangan*, Badan
Pertimbangan Pendidikan
Nasional, Jakarta, 1994.

Mujiman, Haris. *Wajib Belajar di
Indonesia Anak Usia 7-12 Tahun*,
Sebelas Maret University Press,
Surakarta, 1994.

Pusat Informatika Badan Penelitian
Dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan. *Statistik
Persekolahan SD 1993/1994,
1994/1995, 1997/1998-
2001/2002, 2006/2007*,
Depdikbud, Jakarta.

____. *Statistik Persekolahan SLTP
1993/1994, 1995/1996,
1997/1998-2000/2001*,
Depdikbud, Jakarta.

____. *Statistik Persekolahan SMP
2006/2007*, Depdikbud, Jakarta.

Ridho, Irsyad, ed, *Pendidikan Proyek
Peradaban yang Terbengkalai*,
Transbook, Jakarta, 2006.

Sihombing, Umberto dkk. *Selintas
Pendidikan Indonesia Di Awal
Tahun 2003: Tujuh Isu
Pendidikan*, Pusat Data dan
Informasi Pendidikan Balitbang
Depdiknas, Jakarta, 2003.

Soedijarto. *Memantapkan Kinerja
Sistem Pendidikan Nasional
dalam Menyiapkan Manusia
Indonesia Memasuki Abad ke-21*,
Proyek Perencanaan Terpadu dan

Ketenagaan Diklusepora, Jakarta,
1997.

Surya, Mohamad. *Bunga Rampai
Guru dan Pendidikan*, Balai
Pustaka, Jakarta, 2004.

Susilo, M. Joko. *Pembodohan Siswa
Tersistematis*, Pinus, Yogyakarta,
2007.

Tilaar, H.A.R, *50 Tahun
Pembangunan Pendidikan
Nasional 1945-1995 Suatu
Analisis Kebijakan*, Grasindo,
Jakarta, 1995.

_____. *Paradigma Baru Pendidikan
Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta,
2000.

C. Surat Kabar

Kompas, 7 Januari 1994.

Kompas, 1 Februari 1994.

Kompas, 4 Februari 1994.

Kompas, 2 April 1994.

Kompas, 24 Mei 1996.

Kompas, 8 Maret 2000.